



PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBER

LAPORAN AKUNTABILITAS
(LAKIP) TAHUN 2024

**DINAS PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN**

TAHUN
2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024 dapat kami selesaikan.

Laporan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan disusun sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2024. Laporan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan berfungsi sebagai alat penilaian kinerja dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta dapat berfungsi sebagai instrument pengendali peningkatan kinerja unit kerja di Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024.

Jember, 20 Februari 2025

Kepala Dinas
Perindustrian Dan Perdagangan
Kabupaten Jember



Wiana Harimuti, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690728 199602 2 001

DAFTAR ISI

	Hal :
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	2
C. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI	2
D. SUMBER DAYA MANUSIA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN JEMBER.....	4
E. PROFIL PELAYANAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	5
F. ISU STRATEGIS.....	6
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	7
A. RENCANA STRATEGIS	7
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN	9
C. INDIKATOR KINERJA UTAMA	11
D. PERJANJIAN KINERJA	12
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	14
A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023.....	14
B. CAPAIAN KINERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN JEMBER	15
C. REALISASI ANGGARAN	39
BAB IV. PENUTUP	42
LAMPIRAN	
Lampiran 1. Matriks Rencana Strategis (RS) 2021-2026	
Lampiran 2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024	
Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	
Lampiran 4. Lampiran SK IKU PD	
Lampiran 5. Penghargaan yang diraih selama tahun 2024 (jika ada)	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Laporan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun 2024 merupakan laporan kinerja atas target kinerja yang tercantum dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2021-2026 dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024

Tujuan yang merupakan kondisi yang diharapkan dapat diwujudkan dalam jangka waktu paling lambat dalam periode s.d tahun 2026, yang meliputi:

1. Meningkatkan Daya Saing Sektor Industri dan Perdagangan

Capaian Kinerja sasaran tahun 2024 yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran IKU atau Indikator Kinerja Sasaran dari Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember tahun 2021-2026, dapat diuraikan sebagai berikut :

- Sasaran 1* : Meningkatkan Kontribusi PDRB Kategori Industri Pengolahan mendapat predikat nilai **baik** Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 3 (tiga) indikator sasaran, dengan capaian 3 (tiga) indikator dengan capaian tergolong **Baik**,
- Sasaran 2* : Meningkatkan Kontribusi PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran mendapat predikat nilai **Baik**. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 3 (tiga) indikator sasaran, 3 (tiga) indikator tergolong Baik.

Dari uraian capaian indikator dapat disimpulkan bahwa target dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah dilaksanakan dengan baik, dimana sebanyak 6 indikator capaian diatas target yaitu dalam kategori **Baik**.

Untuk mendukung pencapaian kinerja tahun 2024 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan dengan mengalokasikan dana dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar 96,40% merupakan Belanja Operasional atau sebesar Rp21.546.901.671,00 dan Belanja Modal sebesar 3.60% atau sebesar Rp803.450.100,00

Sedangkan realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp21.219.780.332,00 atau 94,94% dari pagu anggaran. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2024 yang disampaikan dibawah ini merupakan data sementara dan belum diaudit oleh BPK. Dari analisis yang dilakukan Ada efisiensi dalam penggunaan anggaran untuk pencapaian kinerja yang disebabkan penghemat terhadap kontrak kegiatan.

Kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pelaporan dan pengukuran target-target sasaran yang telah ditetapkan dalam tahun 2024 antara lain:

1. Belum tersedianya data dari BPS yang terbaru

Beberapa rekomendasi perbaikan dalam meningkatkan pencapaian kinerja di tahun 2024 antara lain :

1. Melaksanakan kegiatan di awal waktu sehingga bila tidak dapat dilaksanakan dapat dilakukan perubahan anggaran melalui PAK.
2. Menyesuaikan target kinerja untuk tahun 2024

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pembangunan tersebut sejalan dengan TAP MPR RI. No. XI / MPR / 1998 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme disebutkan salah satu asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit di Lingkungan Perangkat Daerah.

Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaan strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun 2024

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan dimaksudkan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan

Tujuan penyusunan Laporan kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah

- Sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder atas pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pengelolaan sumber daya yang menjadi kewenangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi

C. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 06 tahun 2023 sebagai berikut :

- (1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah di Bidang Perindustrian dan urusan pemerintah di Bidang Perdagangan.
- (2) Dinas Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan di bidang perindustrian dan urusan pemerintah di bidang perdagangan.
- (4) Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi

- a. perumusan kebijakan daerah di bidang perindustrian dan perdagangan;
 - b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perindustrian dan perdagangan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang perindustrian dan perdagangan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang perindustrian dan perdagangan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Susunan organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari :
- a. Sekretariat, terdiri atas Sekretaris yang mempunyai tugas pokok dan fungsi Merencanakan, Melaksanakan, Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi, umum, kepegawaian, perlengkapan dan asset, penyusunan program dan keuangan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
Sekretarat terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Sub Bagian Perencanaa, Pelaporan dan Keuangan
 - b. Bidang Perindustrian, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dengan tugas pokok dan fungsi merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pemantapan pembangunan sumberdaya industry, pengendalian dan pengawasan industry, Kerjasama, dan promosi investasi industry serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
 - c. Bidang Perdagangan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dengan tugas pokok dan fungsi merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pembinaan dan pengembangan pasar, penggunaan dan pemasaran produk local, pengawasan barang beredar, pengendalian barang pokok dan penting serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
 - d. Bidang Sarana dan Prasarana Industri dan Perdagangan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dengan tugas pokok dan fungsi merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan, Menyusun

rencana program kegiatan Sarana dan Prasarana Industri dan Perdagangan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

- e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- g. Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- h. Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

D. SUMBER DAYA MANUSIA DINAS PERINDUSTRIAN dan PERDAGANGAN

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi dengan kuantitas dan kualitas yang memadai sesuai analisa jabatan dan kompetensi. Berdasarkan hasil analisa jabatan kebutuhan pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang dituangkan pada Keputusan Bupati Jember Nomor: 188.45/239/1.12/2024 tentang Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember. Jumlah personil Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang ada per 31 Desember 2024 berdasarkan keterisian pegawai yang datanya sudah di Dinas Perindustrian dan Perdagangan melalui SIMPEG sebanyak 81 orang ASN, dan 260 orang Non ASN, sedangkan berdasarkan hasil analisa jabatan dan analisa beban kerja idealnya sebanyak 350 orang, sehingga masih terdapat kekurangan pegawai ASN sebanyak 269 orang atau 76,85%.

Komposisi pegawai keseluruhan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Komposisi Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024

Jabatan	Kebutuhan					Bezetting/ Pegawai Yang Ada						L	P
	∑	SMA	D3	S1	S2	∑	SMP	SMA	D3	S1	S2		
Jabatan Pimpinan Tinggi	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1
Jabatan Administrasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Administrator	8	0	0	7	1	7	0	0	0	7	0	3	4
2. Pengawas	6	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pelaksana	317	283	18	16	0	63	22	36	0	19	0	12	65
Jabatan Fungsional	19	2	3	13	1	9	0	1	0	10	1	5	7
Non ASN						260	41	167	10	42	0	37	223

Jumlah	350	285	21	42	2	340	63	204	10	78	3	57	300
--------	-----	-----	----	----	---	-----	----	-----	----	----	---	----	-----

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2024

Berdasarkan tabel 1.1, menunjukkan adanya gap antara kebutuhan pegawai dari hasil analisis jabatan dengan bezetting pegawai. Jumlah pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan masih belum memenuhi jumlah ideal untuk pengelolaan beban kerja di Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang mana pada saat ini jumlah pegawai ASN yang ada hanya 81 orang, sedangkan idealnya membutuhkan 350 (tiga ratus lima puluh) ASN untuk mendukung kelancaran beban kerja yang ada pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember.

E. SARANA PRASARANA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi selain penguatan pada sumber daya manusia, juga diperlukan dukungan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang keberhasilan ketercapaian tugas pokok dan fungsi Institusi. Dinas Perindustrian dan Perdagangan menempati gedung di Jalan Kalimantan 82 Sumpersari Jember.

Sebagai penunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang semakin meningkat, maka gedung Dinas Perindustrian dan Perdagangan Cukup memadai, karena sudah sesuai dengan kebutuhan Adapun data sarana dan prasarana pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2
Profil Sarana dan Prasarana Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Per 31 Desember 2024

No	Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi	Jumlah ideal
1	Bangunan Gedung Kantor Tempat Kerja	3	Baik	3
2	Bangunan Gedung Pasar Rakyat	22	Baik	22
3	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	1	Rusak	1
4	Kendaraan Dinas Roda 4	3	Baik	8
		5	Rusak	
5	Laptop	15	Baik	23
		23	Rusak	
6	Komputer/PC	50	Baik	105

		55	Rusak	
7	AC	20	Baik	20

Sumber Data : Kartu Inventaris Barang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024

Dalam menunjang terlaksananya pelayanan publik yang prima diperlukan sarana dan prasarana yang memadai, namun pada kondisi saat ini banyak sarana dan prasarana yang kondisinya kurang baik, Setelah dilakukan identifikasi maka masalah-masalah utama yang umumnya dihadapi oleh pasar-pasar tradisional di Kabupaten Jember adalah:

1. Infrastruktur dan Fasilitas

- **Bangunan Tua dan Tidak Memadai:** Banyak bangunan pasar yang sudah berusia tua, sebagian bangunan belum permanen, sehingga kondisi fisiknya sudah tidak layak. Atap bocor, dinding retak, dan lantai yang tidak rata adalah masalah umum.
- **Fasilitas yang Terbatas:** Ketersediaan fasilitas pendukung seperti toilet, tempat parkir, dan tempat sampah masih sangat terbatas dan kondisinya tidak memadai.
- **Sanitasi yang Buruk:** Sistem drainase yang kurang baik (mampet dan tidak berfungsi) menyebabkan genangan air saat hujan dan membuat lingkungan pasar menjadi kotor.
- **Pencahayaan dan Ventilasi yang Tidak Memadai:** Kurangnya pencahayaan dan ventilasi yang baik membuat suasana pasar menjadi pengap dan tidak nyaman.

2. Kebersihan dan Kesehatan

- **Sampah Berserakan:** minimnya fasilitas pengelolaan sampah menyebabkan sampah berserakan di mana-mana.
- **Kualitas Air dan Sanitasi:** Kualitas air yang digunakan untuk mencuci bahan makanan dan keperluan lainnya seringkali tidak terjamin kebersihannya.

3. Tata Laksana dan Pengelolaan

- **Tata Letak yang Tidak Efisien:** Tata letak kios dan lorong pasar seringkali tidak teratur, sehingga menghambat sirkulasi udara dan membuat pengunjung kesulitan mencari barang yang diinginkan (zonasi belum tertata).

- Sistem Pengelolaan Sampah yang Belum Optimal: Belum adanya sistem pengelolaan sampah yang terpadu, mulai dari pengumpulan, pemilahan, hingga pengolahan.
- Kurangnya Partisipasi Pedagang: Kurangnya kesadaran dan partisipasi pedagang dalam menjaga kebersihan dan ketertiban pasar.

Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, diperlukan upaya revitalisasi pasar yang komprehensif, meliputi:

- Perbaikan infrastruktur fisik: Memperbaiki bangunan, meningkatkan fasilitas, dan memperbaiki sistem sanitasi.
- Peningkatan kebersihan dan kesehatan: menyediakan tempat sampah yang memadai.
- Penataan tata letak: Membuat tata letak pasar yang lebih efisien dan menarik.

F. ANGGARAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada tahun 2024 berasal dari APBD Kabupaten Jember. Pada tahun anggaran 2024 Dinas Perindustrian dan Perdagangan memiliki Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang secara total mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 23.812.589.231,- sebagaimana tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 1.4
Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Tahun 2024

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp,-)
1	Program penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp.17.102.648.349
1.1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Rp.10.270.113.378
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp.10.152.801.938
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp.117.311.440
1.3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah	Rp.709.168.171
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp.1.872.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.31.393.900
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.290.039.071
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp.212.188.000

	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKDINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Rp.173.675.200
1.4	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.5.456.846.700
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp.570.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa, Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.455.001.700
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.5.000.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.4.996.275.000
1.5	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.666.520.100
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp.75.063.500
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.457.756.600
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.5.000.000
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp.128.700.000
2	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp.1.628.413.600
2.1	Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Saran Distribusi Perdagangan	Rp.1.628.413.600
	Sub Kegiatan Penyediaan Saranan Distribusi Perdagangan	Rp.852.203.600
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp.776.210.000
3	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp.10.030.000.000
3.1	Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Rp.10.030.000.000
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Rp.10.030.000.000
	Program Stadarisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp.47.940.000
	Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	Rp.47.940.000
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Rp.47.940.000
	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp.4.003.587.282
	Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Rp.4.003.587.282
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Rp.266.000.000
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Rp.3.737.587.282

	JUMLAH	Rp.23.812.589.231
--	---------------	--------------------------

Sumber Data : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024

G. ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Mengacu pada Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2039 dan RPIK (Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota), sehingga renstra kita dapat selaras dengan kebijakan dari Provinsi Jawa Timur dan Kementerian Perindustrian

1. Berikut issue-issue strategis yang dapat disampaikan dalam renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember:
2. Perlunya penguatan penguasaan pangsa pasar baik pasar domestic dan pasar internasional.
3. Perlunya mendorong percepatan tumbuhnya Industri Hijau yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan (Sustainability).
4. Mendorong terwujudnya Perwilyahan Industri (Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Industri, Sentra IKM),
5. Perlunya penyediaan akses permodalan yang kompetitif.
6. Perlunya Pembangunan teknologi informasi yang terintegrasi antara IKM dan Pemerintah.
7. Perlunya peningkatan SDM yang kompeten (Pelatihan berbasis kompetensi)
8. Perlunya penguatan kelembagaan IKM dalam menghadapi persaingan global.
9. Perlunya peningkatan efisiensi dan kualitas produk yang terstandarisasi.
10. Perlunya peningkatan pemanfaatan Sumber Daya Lokal secara optimal.

11. Perlunya peningkatan penguasaan teknologi dan inovasi yang bersifat inklusif
12. Kondisi pasar tradisional yang tidak memadai (Sarana dan Prasarana Pasar yang belum memadai)
13. Minimnya sarana pendukung ikm (Belum tersedianya fasilitas produksi bersama (sentra IKM), gudang logistik, atau teknologi yang memadai untuk membantu pelaku usaha kecil)
14. Minimnya infrastruktur dan pelatihan terkait digitalisasi, seperti aplikasi pemasaran online untuk pelaku perdagangan
15. Kurangnya akses teknologi modern dan rendahnya adaptasi terhadap tren perdagangan digital rendah (e-commerce)

Isu-isu strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan dirumuskan dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal termasuk permasalahan layanan. Adapun isu strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi, yaitu:

a. Industri

1. Pengembangan industri berbasis agro
2. Mengurangi ketergantungan industri terhadap bahan baku impor
3. Peningkatan daya saing berdasarkan keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif
4. Masih rendahnya daya saing, kualitas dan desain produk
5. Memperkuat peran IKM dalam hal pemodal dan akses informasi

b. Perdagangan

1. Belum optimalnya jaringan pasar dalam dan luar negeri
2. Fluktuasi indeks harga konsumen yang berpengaruh pada daya beli
3. Pengawasan peredaran barang dan jasa yang ber SNI
4. Perlindungan hak-hak konsumen dan pengamanan perdagangan
5. Sistem logistik dan konektivitas antar daerah
6. Harga produk agro belum stabil karena panjangnya mata rantai distribusi perdagangan.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan penjabaran operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember tahun 2021-2026. Rencana Strategis ditetapkan dengan Peraturan Bupati Jember nomor 41 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jember nomor 99 tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Jember tahun 2021-2026.

Visi dan misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Jember, mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025. RPJPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja.

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Pemerintah Kabupaten Jember pada periode 2021-2026 yaitu: “Sudah waktunya membenahi Jember (*Wes Wayahe Mbenahi Jember*) dengan berprinsip pada sinergi, kolaborasi, dan akeselerasi dalam membangun Jember.” Yang selanjutnya dijabarkan dalam 7 (tujuh) misi pembangunan, sebagai sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

Sesuai *cascade* kinerja, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Misi, tujuan dan sasaran daerah yang di dukung Dinas Perindustrian dan Perdagangan yaitu

Misi : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan semangat sinergitas dan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat yang berbasiskan potensi daerah

Tujuan RPJMD : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif dan Berbasis Potensi Wilayah

Sasaran RPJMD :

- Meningkatkan Kontribusi PDRB Kategori Industri Pengolahan.
- Meningkatkan Kontribusi PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Perbaikan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan dilakukan pada tahun 2023, yaitu pada perumusan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah yang dituangkan dalam Dokumen Kertas Kerja TC.25 (Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah), sehingga tujuan dan sasaran Kecamatan Kaliwates adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Matriks Tujuan Dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Tahun 2021-2026

Tujuan 1 : Meningkatkan PDRB Sektor Industri Dan Perdagangan

Indikator Tujuan 1 : - Kontribusi PDRB Kategori Industri Pengolahan

- Kontribusi PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Sebelum Perubahan							
Meningkatkan Daya Saing Sektor Industri	Persentase Pertumbuhan Usaha Industri	8,08%	8,08%				
	Persentase IKM yang	50%	50%				

	Mempunyai IUI						
Meningkatkan Daya Saing Sektor Perdagangan	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan terhadap PDRB Kab.Jember	8,28%	8,28%				
	Persentase Peningkatan UTTP Bertanda Tera	5%	5%				
	Persentase Pasar Rakyat yang ber-SNI	3,3%	3,3%				
Setelah Perubahan							
Meningkatkan Kontribusi PDRB Kategori Industri Pengolahan	Persentase Pertumbuhan Usaha Industri			9,08%	9,58%	10,08%	10,5%
	Persentase IKM yang mempunyai IUI			50%	55%	60%	65%
Meningkatkan Kontribusi PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan terhadap PDRB Kab.Jember			9,28%	9,78%	10,28%	8,28%
	Persentase Peningkatan UTTP bertanda tera			5%	5%	5%	5%

Sumber : Rencana Strategis. Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun 2021-2026

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. IKU merupakan ukuran keberhasilan yang

menggambarkan kinerja utama PD sesuai dengan tugas fungsi dan mandat (*core business*) yang diemban. Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

Tabel 2. 2
Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi Perhitungan dan Penjelasan Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatkan Kontribusi PDRB Kategori Industri Pengolahan	Kontribusi PDRB Kategori Industri Pengolahan	<p>Formulasi Perhitungan : Nilai PDRB Industri Pengolahan = Nilai PDRB Kategori Industri Pengolahan tahun ke-n</p> <p>Penjelasan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PDRB adalah Jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian yang merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan - PDRB industri pengolahan Meliputi Aspek Produksi, Tembakau, Olahan Pangan - Data nilai PDRB diperoleh dari data PDRB yang dirilis oleh BPS - n = Realisasi Tahun ke-n 	Bidang Perindustrian	Badan Pusat Statistik
	Persentase Pertumbuhan Usaha Industri	<p>Formulasi Perhitungan : = (Pertumbuhan Usaha Industri tahun ke-n /</p>	Bidang Perindustrian	Data Bidang Perindustrian

		<p>Pertumbuhan Usaha Industri $n-1$) x 100 %</p> <p>Penjelasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pertumbuhan usaha industri adalah Pertumbuhan suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan - n = Realisasi Tahun ke-n 		
	<p>Persentase IKM yang mempunyai IUI</p>	<p>Formulasi Perhitungan : Prosentase IKM yang mempunyai IUI = $\frac{\text{IKM yang mempunyai IUI}}{\text{IKM yang tidak mempunyai IUI}} \times 100\%$ Penjelasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - IKM adalah sub sektor yang mengelola jenis-jenis industri yang berskala kecil atau menengah seperti industri rumah tangga, dan industri skala kecil lainnya yang lebih mudah untuk dibentuk oleh masyarakat terutama masyarakat ekonomi menengah ke bawah. - IUI adalah izin Usaha Industri dalam mendirikan perusahaan industri bagi perusahaan dengan nilai investasi seluruhnya lebih dari Rp.200.000.00,- (dua ratus juta rupiah) tidak 	<p>Bidang Perindustrian</p>	<p>Data Bidang Perindustrian</p>

		termasuk tanah dan bangunan tempat usaha		
Meningkatkan Kontribusi PDRB Kategori Besar dan Eceran	Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran	<p>Formulasi</p> <p>Perhitungan :</p> <p>Nilai PDRB Perdagangan Besar dan Eceran = Nilai PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran tahun ke-n</p> <p>Penjelasan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PDRB adalah Jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian yang merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan - PDRB sektor Perdagangan besar dan eceran meliputi aspek Sektor perdagangan besar meliputi perusahaan atau industri yang cenderung membeli dalam jumlah besar dan langsung dari pabrik untuk dijual kembali seperti grosir, eksportir, dan importir. Pedagang eceran membeli dari pedagang besar dan menjualnya secara langsung ke konsumen secara eceran. 	Bidang Perdagangan	BPS

		<ul style="list-style-type: none"> - Data nilai PDRB diperoleh dari data PDRB yang dirilis oleh BPS - n = Realisasi Tahun ke-n 		
	<p>Prosentase Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Jember</p>	<p>Prosentase PDRB Kategori Perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Jember = (Prosentase PDRB Kategori Perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Jember tahun ke-n) – (Prosentase PDRB Kategori Perdagangan n-1) x 100</p>	Bidang Perdagangan	Data Bidang Perdagangan
	<p>Prosentase Peningkatan UTTP bertanda tera</p>	<p>Formulasi Perhitungan : Prosentase Peningkatan UTTP bertanda tera = (UTTP bertanda tera tahun ke-n / UTTP bertanda tera n-1) x 100</p> <p>Penjelasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - UTTP Adalah singkatan dari alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya, merupakan alat-alat yang diperuntukkan atau dipakai untuk pengukuran, penakaran, dan penimbangan suatu kuantitas dan/atau kualitas sesuai dengan Undang - Undang No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal - Bertanda tera Adalah adalah tanda yang dibubuhkan dan/atau dipasang pada UTTP atau pada surat 	Bidang Perdagangan	Data UPT Metrologi Legal

		<p>keterangan tertulis yang berbentuk sampul atau label atau bentuk lainnya saat dilakukan peneraan dan/atau peneraulangan yang menyatakan sah atau tidak sahnya UTTP dipergunakan di bidang Metrologi Legal sesuai dengan Undang - Undang No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal</p> <p>- n = Realisasi Tahun ke-n</p>		
--	--	---	--	--

Sumber : Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan no 65/125.b/35.09.331/2024 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU)

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja menyajikan indikator sasaran Perangkat Daerah sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang ingin diwujudkan pada tahun berkenaan.

Sesuai PermenPANRB nomor 53 tahun 2014, perjanjian kinerja memuat IKU dan indikator lain yang relevan. Terdapat kebijakan untuk mendorong peningkatan kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember dengan menambahkan indikator tambahan/penghargaan nasional dan provinsi sesuai tugas dan fungsi PD kedalam Perjanjian Kinerja PD tahun 2024.

Pada lampiran Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024 dicantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama, indikator kinerja lain yang relevan, target kinerja, program-program utama serta anggaran yang disediakan untuk mewujudkan sasaran.

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024
1	Meningkatkan Kontribusi PDRB Kategori Industri Pengolahan	Kontribusi PDRB Kategori Industri Pengolahan	21,51%
		Prosentase Pertumbuhan Usaha Industri	9,58%
		Persentase IKM yang mempunyai IUI	55%
2	Meningkatkan Kontribusi PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran	Kontribusi PDRB Kategori Pedagang Besar dan Eceran	15,51%
		Prosentase kontribusi PDRB sektor Perdagangan terhadap PDRB Kab. Jember	9,78%
		Prosentase peningkatan UTTP bertanda tera	5%

Sumber: Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun 2024

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Rp. 17.102.648.349,00	APBD
2.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp. 1.628.413.600,00	APBD
3.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp. 1.030.000.000,00	APBD dan DBHCHT
4.	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp. 47.940.000,00	APBD
5.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp. 4.003.587.282,00	APBD dan DBHCHT
	Jumlah	Rp. 23.812.589.231,00	

D. ALOKASI ANGGARAN PER SASARAN TAHUN 2024

Berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan terlampir, dapat diketahui proporsi pengalokasian belanja pada program pendukung pencapaian sasaran sebagai berikut:

a) Sasaran Strategis I : Meningkatkan Kontribusi PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran

Didukung oleh :

- Program Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dengan Anggaran Rp.17.102.648.349
- Program Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dengan Anggaran Rp.1.628.413.600
- Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dengan anggaran Rp.1.030.000.000
- Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen dengan anggaran Rp.47.940.000

Keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp19.761.061.949 yang dialokasikan untuk sasaran I adalah sebesar 82.98% dari keseluruhan belanja langsung Dinas Perindustrian dan Perdagangan

b) Sasaran Strategis II : Meningkatkan Kontribusi PDRB Kategori Industri Pengolahan

Didukung oleh :

- Program Perencanaan dan Pembangunan Industri dengan Anggaran Rp.4.003.587.282

Keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp4.003.587.282 yang dialokasikan untuk sasaran II adalah sebesar 16.81% dari keseluruhan belanja langsung Dinas Perindustrian dan Perdagangan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024

Pengukuran capaian sasaran bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam merealisasikan target- target yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran capaian indikator kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan menggunakan ketentuan sebagai berikut :

1. Predikat nilai realisasi kinerja dikelompokkan dalam skala nilai dengan pendekatan penilaian capaian kinerja dengan kriteria sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	≥ 90	Sangat Tinggi	
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	
3.	$66 \leq 75$	Sedang	
4.	$51 \leq 65$	Rendah	
5.	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri nomor 86 tahun 2017

2. Cara menghitung prosentase capaian indikator kinerja adalah :
 - a. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progress positif**, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

- b. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna ***progress negative***, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

B. CAPAIAN KINERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun 2024 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Pengukuran target kinerja yang telah ditetapkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Serta membandingkan antara realisasi pada tahun 2024 dengan target pada akhir periode Renstra untuk mengetahui kemajuan yang telah dicapai.

Tabel 3.2

Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target 2024	Realisasi 2024	Tingkat Capaian Kinerja (% realisasi)	Target Akhir Renstra (2026)	Tingkat capaian terhadap target akhir renstra
1	2	3	4	5	6 ($\frac{5}{4} \times 100\%$)	7	8 ($\frac{5}{7} \times 100\%$)
	Meningkatkan Kontribusi PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran	Persentase Pertumbuhan Usaha Industri	9.58%	9.58%	100%	10.58%	90.55%
		Persentase IKM yang mempunyai IUI	55%	55%	100%	65%	84.61%
		Kontribusi PDRB Kategori Industri Pengolahan	21,51%	21,51%	100%	22,38%	96,11%
	Meningkatkan Kontribusi PDRB Kategori Industri Pengolahan	Persentase Kontribusi PDRB sector Perdagangan Terhadap PDRB Kab. Jember	9.78%	9.78%	100%	10.78%	90.72%
		Persentase peningkatan UTP Bertanda Tera	5%	5%	100%	5%	100%
		Prosentase Kontribusi PDRB Kategori Pedagang Besar dan Eceran	15,51%	15,51%	100%	16,45%	94,28%

Sumber Data Realisasi : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian (jumlah). indikator sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan rata rata mencapai 100% dan masuk

dalam kategori tinggi. Dan dibandingkan dengan target akhir periode Renstra, realisasi tahun 2024 menunjukkan tinggi Dengan demikian maka secara umum Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah melaksanakan tugas pokok fungsi dalam bidang Perdagangan dan Industri secara baik dalam rangka mencapai tujuan organisasi seperti yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun 2021 -2026

Selanjutnya untuk mengetahui tren realisasi dari sasaran organisasi, juga dilakukan pengukuran kinerja dengan membandingkan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun tahun sebelumnya.

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian kinerja Sasaran tahun 2024 dengan tahun sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Realisasi			
		2021	2022	2023	2024
Meningkatkan Kontribusi PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran	Persentase Pertumbuhan Usaha Industri		8.08%	9.1%	10.08%
	Persentase IKM yang mempunyai IUI		50%	52%	55%
	Kontribusi PDRB Kategori Industri Pengolahan				21,51%
Meningkatkan Kontribusi PDRB Kategori Industri Pengolahan	Persentase Kontribusi PDRB sector Perdagangan Terhadap PDRB Kab. Jember		8.28%	13%	9.78%
	Persentase peningkatan UTTP Bertanda Tera		5%	5.1%	5%
	Prosentase Kontribusi PDRB Kategori Pedagang Besar dan Eceran			14,89%	15,51%

Sumber Data Realisasi: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember

Perbandingan capaian kinerja sasaran tahun 2024 dengan tahun sebelumnya sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan Kontribusi PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran

Berdasarkan data tabel 3.3, menunjukkan tren peningkatan realisasi sejak kurun waktu tahun 2021 s.d 2024.

Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan Kontribusi PDRB Kategori Industri Pengolahan

Berdasarkan data tabel 3.3, menunjukkan tren peningkatan realisasi sejak kurun waktu tahun 2021 s.d 2024.

Tabel 3.4
(Perbandingan Realisasi Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan Realisasi Nasional/ Regional Jawa Timur/ Realisasi Kabupaten)

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Realisasi Th. 2024	Realisasi Nasional	Ket. (+/-)
1	Meningkatkan Kontribusi PDRB Kategori Industri Pengolahan	Kontribusi PDRB Kategori Industri Pengolahan	21.51%		
		Prosentase Pertumbuhan Usaha Industri	10.08%		
		Persentase IKM yang mempunyai IUI	55%		
2	Meningkatkan Kontribusi PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran	Kontribusi PDRB Kategori Pedagang Besar dan Eceran	15,51%		
		Prosentase kontribusi PDRB sektor Perdagangan terhadap PDRB Kab. Jember	9.78%		
		Prosentase peningkatan UTTP bertanda tera	5%		

Sumber Data: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember

Realisasi kinerja atas indikator Sasaran Kontribusi PDRB Kategori Industri Pengolahan, Prosentase Pertumbuhan Usaha Industri, Persentase IKM yang mempunyai IUI, Prosentase Kontribusi PDRB Kategori Pedagang Besar dan Eceran, Prosentase kontribusi PDRB sektor Perdagangan terhadap PDRB Kab. Jember, Prosentase peningkatan UTTP bertanda tera tidak dapat diperbandingkan dengan realisasi nasional atau realisasi kabupaten dan kota se- Provinsi Jawa Timur dikarenakan tidak adanya data realisasi untuk indikator yang sama.

C. ANALISIS PROGRAM KEGIATAN YANG MENDUKUNG SASARAN

Tabel 3.5
Program Pendukung Sasaran

Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Pendukung Sasaran	Anggaran (Rp....)	Realisasi (Rp....)	% Serapan Anggaran
Sasaran 1 : Meningkatkan Kontribusi PDRB Kategori Industri Pengolahan	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp. 4.003.587.282,00	Rp. 2.527.348.084,00	63,13%
	Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Rp. 4.003.587.282,00	Rp. 2.527.348.084,00	63,13%
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Rp266.000.000	Rp261.612.800	98%
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Rp3.737.587.282	Rp2.265.735.285	61%
Total		Rp. 4.003.587.282,00	Rp. 2.527.348.084,00	63,13%
Sasaran 2 : Meningkatkan Kontribusi PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp. 1.628.413.600,00	Rp. 1.336.999.100,00	82,10%
	Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp. 1.628.413.600,00	Rp. 1.336.999.100,00	82,10%

	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp852.203.600	Rp663.159.100	78%
	Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp776.210.000	Rp673.840.000	87%
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp. 1.030.000.000,00	Rp. 1.029.097.500,00	99,91%
	Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Rp. 1.030.000.000,00	Rp. 1.029.097.500,00	99,91%
	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Rp. 1.030.000.000	Rp1.029.097.500	99,91%
	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp47.940.000	Rp30.400.000	63%
	Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	Rp47.940.000	Rp30.400.000	63%
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Rp47.940.000	Rp30.400.000	63%
Total		Rp. 2.706.353.600,00	Rp. 2.396.496.600,00	88,55%

Pelaksanaan program/ kegiatan / sub kegiatan guna mendukung tercapainya kinerja **sasaran** Meningkatkan Kontribusi PDRB Kategori Industri Pengolahan adalah sebagai berikut :

1. Program: Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.

Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri.

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	266.000.000	Rp		
Output	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dokumen	5	5

Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri untuk kegiatan pelatihan seperti :

1. Pelatihan Batik Pewarna Alam
2. Pelatihan Olahan Pangan (Kue Kering)





Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.

Sub Kegiatan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	3.737.587.282	Rp		

Output	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	60	
--------	---	---------	----	--

Sub Kegiatan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat untuk kegiatan pelatihan yang menggunakan Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau sebagai berikut :

1. Pelatihan Peningkatan Kapabilitas Sortasi Tembakau
2. Pelatihan Redrying tembakau krosok
3. Pelatihan Proses produk cerutu
4. Pelatihan Standart mutu dan kualitas cerutu
5. Pelatihan Ekspor dan regulasi bea cukai
6. Pelatihan Pelinting rokok
7. Pelatihan Strategi branding dan promosi produk iht
8. Pelatihan Perajangan tembakau
9. Pelatihan Pembuatan dan blending tsg
10. Pelatihan Manajemen distribusi iht
11. Pelatihan Manajemen sumber daya manusia







Pelaksanaan program/ kegiatan / sub kegiatan guna mendukung tercapainya kinerja **sasaran** Meningkatkan Kontribusi PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran adalah sebagai berikut :

1. Program Penigkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	852.203.600	Rp		
Output	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Dokumen		

Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi perdagangan untuk kegiatan rehab pasar, sebagai berikut:

- 1) Pasar Tanjung
- 2) Pasar Sempolan
- 3) Pasar Puger
- 4) Pasar Balung Lama





Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
 Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	776.210.000	Rp		
Output	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Dokumen		

Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi perdagangan untuk kegiatan monev sarana dan prasarana pasar, sebagai berikut:

- 1) Pasar Tanjung
- 2) Pasar Gebang
- 3) Pasar Burung
- 4) Pasar Kreyongan
- 5) Pasar Patrang
- 6) Pasar Mangli
- 7) Pasar Tegal Besar
- 8) Pasar Wirolegi
- 9) Pasar Sukorejo
- 10) Pasar Bungur

- 11) Pasar Tegalboto
- 12) Pasar Kepatihan
- 13) Pasar Rambipuji
- 14) Pasar Bangsalsari
- 15) Pasar Petung
- 16) Pasar Tanggal
- 17) Pasar Manggisan
- 18) Pasar Umbulsari
- 19) Pasar Gladak Merah
- 20) Pasar Menampu
- 21) Pasar Puger
- 22) Pasar Balung
- 23) Pasar Balung Kulon
- 24) Pasar Ambulu
- 25) Pasar Jenggawah
- 26) Pasar Mayang
- 27) Pasar Sempolan
- 28) Pasar Kalisat
- 29) Pasar Sukowono
- 30) Pasar Sukosari





2. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
 Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang
 Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
 Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang
 Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	1.030.000.000	Rp		

Output	Jumlah Laporan Dokumen		
	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		

Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota merupakan kegiatan Operasi Pasar Murah dan Operasi Pasar dampak Inflasi, kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai berikut:

No	Tanggal	Hari	Lokasi
1	2 Januari 2024	Selasa	Pasar Mangli
2	3 Januari 2024	Rabu	Wayaha Pasar Jember Resik
3	4 Januari 2024	Kamis	Pasar Gebang
4	5 Januari 2024	Jumat	Pasar Kreyongan
5	8 Januari 2024	Senin	Pasar Tanjung
6	9 Januari 2024	Selasa	Pasar Mangli
7	10 Januari 2024	Rabu	Wayaha Pasar Jember Resik
8	11 Januari 2024	Kamis	Pasar Tegal Besar
9	12 Januari 2024	Jumat	Pasar Kreyongan
10	15 Januari 2024	Senin	Pasar Tanjung
11	16 Januari 2024	Selasa	Pasar Mangli
12	17 Januari 2024	Rabu	Wayaha Pasar Jember Resik
13	18 Januari 2024	Kamis	Pasar Tegal Besar
14	19 Januari 2024	Jumat	Pasar Kreyongan
15	22 Januari 2024	Senin	Pasar Tanjung
16	23 Januari 2024	Selasa	Pasar Mangli
17	24 Januari 2024	Rabu	Wayaha Pasar Jember Resik
18	25 Januari 2024	Kamis	Pasar Tegal Besar
19	26 Januari 2024	Jumat	Pasar Kreyongan
20	29 Januari 2024	Senin	Pasar Tanjung
21	30 Januari 2024	Selasa	Pasar Mangli
22	31 Januari 2024	Rabu	Wayaha Pasar Jember Resik
23	1 Februari 2024	Kamis	Pasar Kreyongan
24	5 Februari 2024	Senin	Pasar Gebang
25	6 Februari 2024	Selasa	Pasar Mangli
26	12 Februari 2024	Senin	Pasar Kreyongan
27	13 Februari 2024	Selasa	Pasar Mangli
28	14 Februari 2024	Rabu	Pasar Tanjung
29	15 Februari 2024	Kamis	Pasar Tegal Besar

30	19 Februari 2024	Senin	Pasar Kreyongan
31	20 Februari 2024	Selasa	Pasar Mangli
32	21 Februari 2024	Rabu	Pasar Tanjung
33	22 Februari 2024	Kamis	Pasar Tegal Besar
34	26 Februari 2024	Senin	Pasar Kreyongan
35	27 Februari 2024	Selasa	Pasar Mangli
36	28 Februari 2024	Rabu	Pasar Tanjung
37	29 Februari 2024	Kamis	Pasar Tegal Besar
38	01 April 2024	Senin	Pasar Kreongan
39	03 April 2024	Rabu	Pasar Tanjung
40	04 April 2024	Kamis	Pasar Tanjung
41	05 April 2024	Jum'at	Pasar Puger
42	22 April 2024	Senin	Pasar Mangli
43	23 April 2024	Selasa	Pasar Gebang
44	24 April 2024	Rabu	Pasar Tanjung
45	25 April 2024	Kamis	Pasar Tegal Besar
46	26 April 2024	Jum'at	Pasar Kreongan
47	29 April 2024	Senin	Pasar Mangli
48	30 April 2024	Selasa	Pasar Tanjung
49	13 Mei 2024	Senin	Pasar Tanjung
50	14 Mei 2024	Selasa	Pasar Mangli
51	15 Mei 2024	Rabu	Pasar Gebang
52	20 Mei 2024	Senin	Pasar Tegal Besar
53	21 Mei 2024	Selasa	Pasar Kreongan
54	27 Mei 2024	Senin	Pasar Tanjung
55	28 Mei 2024	Selasa	Pasar Mangli
56	29 Mei 2024	Rabu	Pasar Gebang
57	03 Juni 2024	Senin	Pasar Tegal Besar
58	04 Juni 2024	Selasa	Pasar Kreongan
59	10 Juni 2024	Senin	Pasar Tanjung
60	11 Juni 2024	Selasa	Pasar Mangli
61	12 Juni 2024	Rabu	Pasar Gebang
62	18 Juni 2024	Selasa	Pasar Kreongan
63	24 Juni 2024	Senin	Pasar Tanjung
64	25 Juni 2024	Selasa	Pasar Mangli
65	06 Juni 2024	Kamis	Pasar Tanjung
66	07 Juni 2024	Jum'at	Pasar Gebang
67	10 Juni 2024	Senin	Kantor Kec. Tanggul
68	11 Juni 2024	Selasa	Kantor Kec. Rambipuji
69	12 Juni 2024	Rabu	Kantor Kec. Kencong
70	13 Juni 2024	Kamis	Kantor Kec. Gumukmas
71	14 Juni 2024	Jum'at	Kantor Kec. Puger
72	19 Juni 2024	Rabu	Kantor Kec./Lapangan Jenggawah
73	20 Juni 2024	Kamis	Kantor Kec. Ambulu
74	21 Juni 2024	Jum'at	Kantor Kec. Pakusari
75	24 Juni 2024	Senin	Kantor Kec. Sukowono

76	25 Juni 2024	Selasa	Kantor Kec. Ledokombo
77	26 Juni 2024	Rabu	Kantor Kec. Kalisat
78	27 Juni 2024	Kamis	Kantor Kec. Mayang
79	28 Juni 2024	Jum'at	Kantor Kec. Arjasa



4. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen

Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan

Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	47.940.000	Rp		

Output	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Dokumen Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang		
--------	--	--	--

Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1.	Jumlah UTTP Bertanda Tera Sah yang berlaku pada tahun berjalan	911
2.	Jumlah Potensi UTTP yang Wajib ditera dan tera ulang di wilayah kabupaten/kota	2005





D. ANALISIS ATAS EFISIENSI SUMBER DAYA

Sumber daya adalah nilai potensi yang dimiliki dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah adalah sumber daya manusia, sarana

prasarana kantor dan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan anggaran 2024 untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan organisasi.

Sumberdaya Manusia Dinas Perindustrian dan Perdagangan berjumlah 358 orang, dengan jumlah anggaran sebesar Rp,23.812.589.231,00 melaksanakan 5 program 8 kegiatan dan 23 sub kegiatan untuk mendukung tercapainya kinerja sasaran strategis, yang menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut :

Tabel 3.6
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran	% Capaian Kinerja	% Serapan Anggaran	Kategori Efisiensi
1. Meningkatkan Kontribusi PDRB Kategori Industri Pengolahan	100%	63,23%	Efisien
2. Meningkatkan Kontribusi PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran	100%	88,55%	Efisien

Sumber : data persentase capaian kinerja pada tabel 3.2 ; data % serapan anggaran pada tabel 3.6

Capaian kinerja Sasaran 1 : Meningkatkan Kontribusi PDRB Kategoori Industri Pengolahan dapat dikategorikan efisien karena 100% capaian kinerja lebih besar daripada 63,23% serapan anggaran.

Capaian kinerja Sasaran 2 : Meningkatkan Kontribusi PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran dapat dikategorikan efisien karena % capaian kinerja lebih besar daripada % serapan anggaran.

E. EVALUASI DAN ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN

Analisis capaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dari hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis faktor penyebab keberhasilan capaian kinerja sasaran sebagai berikut :

Tabel 3.7
Rekapitulasi Predikat Capaian Kinerja pada tahun 2024

Sasaran/ Indikator Sasaran	% Capaian	Predikat Kinerja				
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah
Sasaran 1 Meningkatkan Kontribusi PDRB Kategori Industri Pengolahan						
Indikator 1.1 Persentase Pertumbuhan Usaha Industri	10.08%		√			
Indikator 1.2 Persentase IKM yang mempunyai IUI	55%		√			
Kontribusi PDRB Kategori Industri Pengolahan	21,51%					
Rata rata capaian	100%		√			
Sasaran 2 Meningkatkan Kontribusi PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran						
Indikator 1.1 Persentase Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Kab. Jember	9.78%		√			
Indikator 1.2 Persentase Peningkatan UTTP Bertanda Tera	5%		√			
Prosentase Kontribusi PDRB Kategori Pedagang Besar dan Eceran	15,51%		√			
Rata rata capaian	100%					

Sumber : tabel 3.2 – 3.4 LKIP tahun 2024

Sasaran Strategis 1:

Hasil evaluasi kinerja atas rekapitulasi capaian kinerja pada tabel 3.7 menunjukkan sasaran mencapai predikat tinggi yaitu mempunyai nilai capaian rata – rata 100 %,

- Penyebab keberhasilan antara lain
 - 1 Adanya dukungan pendanaan yang cukup besar dari DBHCT dan DAU
 2. Jumlah pelatihan yang lebih banyak

- Terhadap kendala yang ada solusi adalah
 1. Kendala waktu yang saling bersamaan, sedangkan sumber daya dan narasumber kurang dilakukan dengan membuat pelatihan secara bersamaan waktu yang sama dengan tempat yang berbeda.
 2. Untuk penyebaran yang terbatas lokasinya , kedepannya penentuan lokasi pelaksanaan kegiatan di perbanyak .
 3. Berkaitan dengan sumber dana yang digunakan bukan hanya DBHCT tetapi bisa menggunakan DAU

- Rencana perbaikan kedepan apa. terhadap yang sudah dilaksanakan.
 1. Memperbanyak jumlah dan jenis pelatihan
 2. Meningkatkan pembinaan kepada IKM agar terdaftar dalam SINNAS

- Inovasi dan / atau program kolaborasi dengan stakeholder antara lain
 1. Melakukan kerjasama dengan Perguruan Tinggi atau Instansi yang terkait

Sasaran Strategis 2 :

Hasil evaluasi kinerja atas rekapitulasi capaian kinerja pada tabel 3.7 menunjukkan sasaran mencapai predikat tinggi yaitu mempunyai nilai capaian rata – rata 100%,

- Penyebab keberhasilan antara lain
 - 1 Tingginya aktivitas perdagangan di Kabupaten Jember, dimana ada 30 Pasar Rakyat yang dikelola oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember tentunya memberikan dampak yang luar biasa serta adanya kegiatan yang dilakukan baik itu operasi pasar maupun pasar murah tentunya berdampak juga.
 2. Tingkat konsumsi domestik yang kuat dikarenakan jumlah penduduk dan tingkat daya beli dari masyarakat Jember yang meningkat dikarenakan

operasi pasar dan pasar murah yang memberikan harga yang relatif murah.

3. Peningkatan Jumlah toko modern berjaringan yang ada
- Terhadap kendala yang ada solusi adalah
 1. Kendala terhadap sumber anggaran dari pasar murah/operasi pasar yang dulu berasal dari DBHCHT untuk kedepannya dialihkan menggunakan dana DAU.
 2. Untuk penyebaran yang terbatas lokasinya , kedepannya penentuan lokasi pelaksanaan kegiatan di perbanyak
 3. Untuk jumlah dan kualitas pelaksanaan yang melibatkan lebih banyak produsen dan distributor
 - Rencana perbaikan kedepan apa. terhadap yang sudah dilaksanakan.
 1. Memperbanyak pelaksanaan kegiatan baik kualitas maupun kuantitas operasi pasar dan pasar murah.
 2. Memperbanyak sosialisasi terhadap pelaksanaan sehingga lebih banyak yang terlibat.
 - Inovasi dan / atau program kolaborasi dengan stakeholder antara lain
 1. Melibatkan lebih banyak stake holder dalam kegiatan yang sama sehingga mempunyai dampak yang lebih luar biasa.

F. REALISASI ANGGARAN

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, pada tahun anggaran 2024 didukung dengan anggaran sebesar Rp yang bersumber dari APBD Kabupaten Jember.

Secara ringkas realisasi anggaran Belanja Operasional dan Belanja Modal sebagai berikut :

1. Belanja Operasional sebesar Rp. 22.278.626.631,00 terealisasi sebesar Rp. 18.952.762.924,00 (85,07%)
2. Belanja Modal sebesar Rp. 1.533.962.600,00 terealisasi sebesar Rp. 1.3547 (88,47%)

Tabel 3.8
Realisasi Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp,-)	Realisasi (Rp,-)	% realisasi
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp17.102.648.349,00	Rp15.031.898.239,00	87,89%
1.1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp10.270.113.378,00	Rp8.903.543.847,00	86,69%
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp10.152.801.938,00	Rp8.903.543.847,00	88%
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp117.311.440,00	Rp0,00	0%
1.2	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp709.168.171,00	Rp593.098.948,00	83,63%
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp1.872.000,00	Rp1.505.000,00	80%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp31.393.900,00	Rp28.817.620,00	92%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp290.039.071,00	Rp266.909.800,00	92%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp212.188.000,00	Rp123.629.860,00	58%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp173.675.200,00	Rp172.236.668,00	99%
1.3	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp5.456.846.700,00	Rp5.042.477.378,00	92,41%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp570.000,00	Rp520.000,00	91%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp455.001.700,00	Rp440.591.378,00	97%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp5.000.000,00	Rp4.500.000,00	90%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp4.996.275.000,00	Rp4.596.866.000,00	92%
1.4	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp666.520.100,00	Rp492.778.066,00	73,93%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp75.063.500,00	Rp59.352.205,00	79%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp457.756.600,00	Rp300.815.361,00	66%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan	Rp5.000.000,00	Rp4.939.500,00	99%

	Peralatan dan Mesin Lainnya			
	Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp128.700.000,00	Rp127.671.000,00	99%
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Rp1.628.413.600,00	Rp1.326.318.200,00	81,45%
2.1	Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp1.628.413.600,00	Rp1.326.318.200,00	81,45%
	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp852.203.600,00	Rp663.159.100,00	78%
	Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp776.210.000,00	Rp663.159.100,00	87%
3	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Rp1.030.000.000,00	Rp1.029.097.500,00	99,91%
3.1	Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Rp1.030.000.000,00	Rp1.029.097.500,00	99,91%
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Rp1.030.000.000,00	Rp1.029.097.500,00	99,91%
4	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Rp47.940.000,00	Rp30.400.000,00	63%
4.1	Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Rp47.940.000,00	Rp30.400.000,00	63%
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Rp47.940.000,00	Rp30.400.000,00	63%
5	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Rp4.003.587.282,00	Rp2.527.004.085,00	63,12%
5.1	Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Rp4.003.587.282,00	Rp2.527.004.085,00	63,12%
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Rp266.000.000,00	Rp261.268.800,00	98%
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Rp3.737.587.282,00	Rp2.265.735.285,00	61%
	JUMLAH	Rp23.812.589.231,00	Rp19.955.742.924,00	81%

Sumber Data : Laporan Realisasi Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan disimpulkan bahwa secara umum Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Dari sejumlah 6 (enam) Indikator yang diperjanjikan dalam PK 2024, sebanyak enam indikator mencapai target dengan kategori Tinggi.

Terkait dengan hal tersebut, kendala atau hambatan yang berpengaruh terhadap pencapaian target adalah :

1. Permasalahan keterbatasan anggaran untuk masing2 kegiatan.
2. Adanya kesalahan terhadap kode rekening sehingga tidak dapat dilaksanakan sebelum adanya perubahan.

Rekomendasi rencana aksi yang lebih efektif untuk perbaikan kedepan sebagai berikut :

1. Lebih memperhatikan pemakaian kode rekening yang betul dalam waktu perencanaan anggaran
2. Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan pada awal tahun

Demikian Laporan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang menggambarkan capaian kinerja tiap-tiap tujuan dan sasaran pada tahun 2024 sebagai bentuk pertanggungjawaban, bahan evaluasi dan penyusunan rencana kegiatan tahun 2025.



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

JL. Kalimantan NO. 82 ☎ (0331) 334497 JEMBER 68121

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN JEMBER

Nomor : 65/ 125.b /35.09.331/2024

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN JEMBER

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
 - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi
- KEEMPAT** : Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk:
- a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah
 - b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah
 - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
 - d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
 - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
- KEENAM** : Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jember

Pada tanggal : 04 Maret 2024

**KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN JEMBER**



YULIANA HARIMURTI, SE, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19740713 199311 1 003

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN JEMBER

- Instansi : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember
- Tugas : Melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan di Bidang Perindustrian dan Urusan Pemerintahan di Bidang Perdagangan
- Fungsi :
- a. Perumusan Kebijakan daerah di Bidang Perindustrian dan Perdagangan.
 - b. Pelaksanaan Kebijakan daerah di Bidang Perindustrian dan Perdagangan.
 - c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan daerah di Bidang Perindustrian dan Perdagangan.
 - c. Pelaksanaan administrasi Dinas di Bidang Perindustrian dan Perdagangan.
 - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- Tujuan : Meningkatkan PDRB sektor Industri dan Perdagangan
- Indikator Tujuan : 1. Kontribusi PDRB Kategori Industri Pengolahan.
2. Kontribusi PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Ecaran.

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN JEMBER

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatkan Kontribusi PDRB Kategori Industri Pengolahan	Kontribusi PDRB Kategori Industri Pengolahan	<p>Formulasi Perhitungan : Nilai PDRB Industri Pengolahan = Nilai PDRB Kategori Industri Pengolahan tahun ke-n</p> <p>Penjelasan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PDRB adalah Jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian yang merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan - PDRB industri pengolahan Meliputi Aspek Produksi, Tembakau, Olahan Pangan - Data nilai PDRB diperoleh dari data PDRB yang dirilis oleh BPS - n = Realisasi Tahun ke-n 	Bidang Perindustrian	Badan Pusat Statistik
		Persentase Pertumbuhan Usaha Industri	<p>Formulasi Perhitungan : $= \frac{\text{Pertumbuhan Usaha Industri tahun ke-n} - \text{Pertumbuhan Usaha Industri tahun ke-n-1}}{\text{Pertumbuhan Usaha Industri tahun ke-n-1}} \times 100 \%$</p> <p>Penjelasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pertumbuhan usaha industri adalah Pertumbuhan suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan - n = Realisasi Tahun ke-n 	Bidang Perindustrian	Data Bidang Perindustrian

		Persentase IKM yang mempunyai IUI	<p>Formulasi Perhitungan : Prosentase IKM yang mempunyai IUI = IKM yang mempunyai IUI / IKM yang tidak mempunyai IUI x 100%</p> <p>Penjelasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - IKM adalah sub sektor yang mengelola jenis- jenis industri yang berskala kecil atau menengah seperti industri rumah tangga, dan industri skala kecil lainnya yang lebih mudah untuk dibentuk oleh masyarakat terutama masyarakat ekonomi menengah ke bawah. - IUI adalah izin Usaha Industri dalam mendirikan perusahaan industri bagi perusahaan dengan nilai investasi seluruhnya lebih dari Rp.200.000.00,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha 	Bidang Perindustrian	Data Bidang Perindustrian
2	Meningkatkan Kontribusi PDRB Kategori Besar dan Eceran	Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran	<p>Formulasi Perhitungan : Nilai PDRB Perdagangan Besar dan Eceran = Nilai PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran tahun ke-n</p> <p>Penjelasan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PDRB adalah Jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian yang merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan - PDRB sektor Perdagangan besar dan eceran meliputi aspek Sektor perdagangan besar meliputi perusahaan atau industri yang cenderung membeli dalam jumlah besar dan langsung dari pabrik untuk dijual kembali seperti grosir, eksportir, dan importir. Pedagang eceran 	Bidang Perdagangan	BPS

			<p>membeli dari pedagang besar dan menjualnya secara langsung ke konsumen secara eceran.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Data nilai PDRB diperoleh dari data PDRB yang dirilis oleh BPS - n = Realisasi Tahun ke-n 		
		<p>Prosentase Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Jember</p>	<p>Prosentase PDRB Kategori Perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Jember = (Prosentase PDRB Kategori Perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Jember tahun ke-n) – (Prosentase PDRB Kategori Perdagangan n-1) x 100</p>	Bidang Perdagangan	Data Bidang Perdagangan
		<p>Prosentase Peningkatan UTTP bertanda tera</p>	<p>Formulasi Perhitungan : Prosentase Peningkatan UTTP bertanda tera = (UTTP bertanda tera tahun ke-n / UTTP bertanda tera n-1) x 100</p> <p>Penjelasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - UTTP Adalah singkatan dari alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya, merupakan alat-alat yang diperuntukkan atau dipakai untuk pengukuran, penakaran, dan penimbangan suatu kuantitas dan/atau kualitas sesuai dengan Undang - Undang No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal - Bertanda tera Adalah adalah tanda yang dibubuhkan dan/atau dipasang pada UTTP atau pada surat keterangan tertulis yang berbentuk sampul atau label atau bentuk lainnya saat dilakukan peneraan dan/atau peneraulangan yang menyatakan sah atau tidak sahnya UTTP dipergunakan di bidang Metrologi Legal sesuai dengan Undang - Undang No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal - n = Realisasi Tahun ke-n 	Bidang Perdagangan	Data UPT Metrologi Legal



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

JL. Kalimantan 82 Telp. (0331) 334497 Jember 68121

PERJANJIAN KINERJA 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : YULIANA HARIMURTI, SE, M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Jember

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Ir.H. HENDY SISWANTO, ST, IPU, ASEAN Eng.

Jabatan : Bupati Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jember, 26 Januari 2024

Pihak Pertama

**KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

Pihak Kedua
BUPATI JEMBER,



Ir.H. HENDY SISWANTO, ST, IPU, ASEAN Eng.

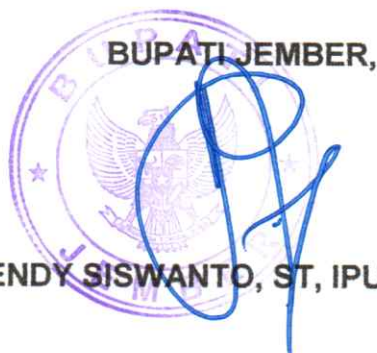
YULIANA HARIMURTI, SE, M.Si
NIP. 19690728 199602 2 001

PERJANJIAN KINERJA 2024
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN JEMBER

NO (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
1	Meningkatkan Kontribusi PDRB Kategori Industri Pengolahan	Kontribusi PDRB Kategori Industri Pengolahan	21.51%
		Persentase Pertumbuhan Usaha Industri	9.58%
		Persentase IKM yang mempunyai IUI	55%
2	Meningkatkan Kontribusi PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran	Kontribusi PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran	15.51%
		Persentase Kontribusi PDRB sector Perdagangan terhadap PDRB Kab. Jember	9.78%
		Persentase peningkatan UTTP bertanda tera	5%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 17.102.648.349,00	APBD
2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp. 1.628.413.600,00	APBD
3. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp. 1.030.000.000,00	APBD dan DBHCHT
4. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp. 47.940.000,00	APBD
5. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp. 4.003.587.282,00	APBD dan DBHCHT
Jumlah	Rp. 23.812.589.231,00	

BUPATI JEMBER,



Ir.H. HENDY SISWANTO, ST, IPU, ASEAN Eng.

Jember, 26 Januari 2024
KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



YULIANA HARIMURTI, SE,M.Si
NIP. 19690728 199602 2 001

RENCANA STRATEGIS DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

KABUPATEN JEMBER

Matrik Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun						Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran		
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	Strategi	Kebijakan	Program
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatnya Daya Saing Sektor Industri dan Perdagangan	Persentase PDRB Sektor Industri	Meningkatnya Daya Saing Sektor Industri	Persentase Pertumbuhan Usaha Industri	8.08%	8.08%	9,08%	9,58%	10,08%	10,58%	Mewujudkan pembangunan ekonomi berbasis industri dan Pengembangan IKM berorientasikan Ekspor	1.Optimalisasi Pembinaan, pendampingan, fasilitasi pertumbuhan industri	1. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri 2. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
												2.Peningkatan kualitas/kompetensi SDM dan produk IKM melalui IKM bersertifikasi	
Persentase IKM yang mempunyai IUI	50%	50%	50%	55%	60%	65%	3.Penyusunan kebijakan daerah untuk Pengembangan IKM						
IKM naik kelas pada tingkat yang lebih tinggi	1%	1%	1%	1%	1%	1%	4.Pembinaan/ pendampingan bagi IKM untuk dapat naik kelas/naik tingkat yang lebih tinggi.						
		Persentase PDRB Sektor Perdagangan an besar	Meningkatnya Daya Saing Sektor Perdagangan	Persentase Kontribusi PDRB sector Perdagangan terhadap PDRB Kab.Jember	8.28%	8.28%	9,28%	9,78%	10,28%	10,78%	Mendorong peningkatan daya saing produk dalam negeri menghadapi	1.Meningkatkan kelancaran arus barang dan bahan kebutuhan pokok dan strategi perlu ditunjang pembangunan sarana dan prasarana secara lintas sektoral	1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah abupaten/Kota

		dan Eceran	Persentase Peningkatan UTPP bertanda tera	5%	5%	5%	5%	5%	5%	persaingan global, serta upaya peningkatan ekspor non migas	2.Promosi produk-produk daerah baik tingkat nasional maupun internasional untuk mendorong aktivitas ekspor	2. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan 3. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan 4. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting 5. Program Pengembangan Ekspor 6. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen
			% Kontribusi Retribusi terhadap PAD Jember	3.30%	3.30%	3.30%	4,30%	5,30%	6.30%		3.Mengembangkan/revitalisasi pasar tradisional dengan pemerintah pusat atau pihak lain sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan pasar	

Jember, Januari 2022
 KEPALA DINAS
 PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
 KABUPATEN JEMBER



BAMBANG SAPUTRO, SH. Msi
 Pembina TK I
 Nip. 19740713 199311 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jl. Kalimantan No. 82 Telp. (0331) 334497 J E M B E R 68121

RENCANA KINERJA TAHUNANAN (RKT)
TAHUN 2024

Nama OPD : DINAS
PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN
RPJMD

MISI	TUJUAN RPJMD	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN RPJMD	INDIKATOR SASARAN
Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan Yang Mandiri dan Berdaya Saing, Berbasis Agrobisnis/Agro-Industri dan Industrialisasi Secara Berkelanjutan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang mandiri dan berdaya saing	Pertumbuhan Ekonomi	Pengembangan Industrialisasi	Kontribusi Peran Industri olahan terhadap PDRB

TUJUAN OPD		SASARAN OPD			PROGRAM/KEGIATAN			SUB KEGIATAN						
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Uraian	Indikator	Target	Uraian	Indikator kegiatan (Output)	Target	Anggaran			
Meningkatkan PDRB Sektor Industri dan Perdagangan	Nilai PDRB Industri Pengolahan	Meningkatkan Kontribusi PDRB Kategori Industri Pengolahan	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	21,51%	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Peredaran Rokok Tanpa Cukai	70%	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	5 Dokumen	266.000.000,00			
			Prosentase Pertumbuhan Usaha Industri	9,58%										
			Prosentase IKM yang mempunyai IUI	55,00%								Persentase Meningkatnya IKM di Kabupaten/Kota	70%	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
	Nilai PDRB Kategori Perdagangan	Meningkatkan Kontribusi PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran	Prosentase Kontribusi PDRB Kategori Perdagangan Terhadap PDRB Kabupaten Jember	9,78%	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Jumlah pasar yang ber-SNI dengan jumlah pasar yang ada	6%					Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	-5 Pasar Rakyat - 1 Pasar Hewan
				Pembangunan dan Peengelolahan Sarana distribusi Perdagangan	Terpenuhinya rehab Pasar Rakyat dan Pasar Hewan per tahunnya	7 Pasar								
							Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	30 Unit	776.210.000,00				
				Peningkatan UTTP Bertanda tera	5,00%	PROGRAM STANDARITASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Pelanggaran perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	70%	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	650 UTTP			

TUJUAN OPD		SASARAN OPD			PROGRAM/KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Uraian	Indikator	Target	Uraian	Indikator kegiatan (Output)	Target	Anggaran
			Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran	15,51%	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Peningkatan volume perdagangan dalam negeri peserta program dibanding total volume perdagangan yang ada	30%				
					Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting ditingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi diselenggarakan pasar murah	31 Tempat	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	31 Laporan	1.030.000.000,00

Jember, 29 Januari 2024
 Kepala Dinas
 Perindustrian dan Perdagangan

YULIANA MARIMURTI, SE, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19690728 199602 2 001

LOGICAL FRAMEWORK / POHON KINERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN JEMBER

ULTIMATE OUTCOME 1 dan 2 Indikator		Kontribusi PDRB kategori Perdagangan Besar dan Eceran IK : Persentase PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran				Kontribusi PDRB Kategori Industri IK : Persentase PDRB Kategori Industri				
INTERMEDIATE OUTCOME Indikator		Meningkatkan Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri serta melaksanakan pemantauan harga, Operasi Pasar dan Pasar Murah Jumlah pelaksanaan pemantauan harga, Operasi Pasar dan Pasar Murah				Meningkatkan Pengadaan, Pengelolaan, Pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana Industri dan Perdagangan Jumlah Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, Pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana Industri dan Perdagangan	Meningkatkan Pembangunan dan pengembangan industri Jumlah Pelaksanaan Bimbingan Teknis dan Pelatihan IKM			
IMMEDIATE OUTCOME Indikator		Meningkatkan Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan IK : Jumlah sarana distribusi perdagangan yang direvitalisasi	Meningkatkan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting IK : Peningkatan volume perdagangan dalam negeri peserta program dibanding total volume perdagangan yang ada	Meningkatkan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/ Kota IK : Jumlah Pasar murah dan Barang Kebutuhan Pokok	Meningkatnya Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota IK : Jumlah Pengawasan Peredara barang dan jasa yang tidak sesuai ketentuan dalam 1 tahun	Meningkatnya Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan IK : Terpenuhi nya rehab Pasar Rakyat dan Pasar Hewan per tahunnya	Meningkatnya Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota IK : Persentase Meningkatnya IKM di Kabupaten/Kota	Meningkatkan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat IK : Jumlah Pelaksanaan Pembedayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Meningkatnya Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri Untuk IUL, IPUL, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota IK : Persentase Perusahaan Industri yang terdaftar di SINAS	
OUTPUT INDIKATOR		1. Tersedianya Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan IK : Jumlah Rekomendasi Ijin Penerbitan izin pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Swalayan yang diterbitkan dalam 1 tahun	1. Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota IK : Jumlah terpenuhinya kebutuhan barang pokok dan barang penting	1. Tersedianya Pengendalian Harga di tingkat pasar IK ; Jumlah pengendalian harga bahan pokok di tingkat Pasar	1. Tersedianya Rekomendasi Perizinan Penyaluran Pupuk dan Pestisida Bersubsidi IK : Jumlah rekomendasi izin penyaluran pupuk dan pestisida bersubsidi	1. Tersedianya Monitoring dan Evaluasi Pasar Rakyat dan Pasar Hewan IK : Terpenuhi nya Monitoring dan Evaluasi Pasar Rakyat dan Pasar Hewan per tahunnya	1. Tersedianya Pengembangan, penyebaran dan Perwilayahan Industri IK Jumlah Pengembangan, penyebaran dan perwilayahan Industri	1. Tersedianya Pelatihan IKM Rokok IK : Jumlah Pelatihan IKM Rokok	1. Tersedianya Pemantauan dan Evaluasi Perusahaan Industri IK : Persentase Perusahaan Industri yang terdaftar di SINAS	
PROSES		Survey pusat Perbelanjaan, Pasar Rakyat Pendataan Pusat Perbelanjaan, Pasar Rakyat Mengeluarkan Rekomendasi Izin	Survey Distributor Sosialisasi Ketersediaan Bahan Pokok Laporan ketersediaan bahan pokok	Suurvey Harga ke pedagangan Merekap harga kebutuhan pokok Pelaporan harga kebutuhan pokok	Survey distributor laporan survey mengeluarkan rekomendasi perizinan	Monev Pasar Rakyat dab Pasar Hewan Pendataan Bangunan Pasar Laporan Monev Bangunan Pasar	Menyiapkan Perencanaan Melaksanakan Koordinasi Pelaporan Hasil Koordinasi	Seleksi Data IKM Rokok Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Laporan Hasil Pelatihan	Pelatihan Operator Pemantauan perusahaan industri melalui SInas Laporan Hasil pemantauan melalui SInas	
OUTPUT INDIKATOR		2. Tersedianya Penerbitan Tanda Daftar Gudang IK : Jumlah Rekomendasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang dalam 1 Tahun	2. Tersedianya stok barang kebutuhan pokok dan Barang Penting IK : Jumlah Lokasi Pasar Murah	2. Tersedianya rehap Pasar Rakyat dan Pasar Hewan IK : Terpenuhi nya rehab Pasar Rakyat dan Pasar Hewan per tahunnya	2. Tersedianya rehap Pasar Rakyat dan Pasar Hewan IK : Terpenuhi nya rehab Pasar Rakyat dan Pasar Hewan per tahunnya	2. Tersedianya Pelatihan Wirausaha Baru IK : Jumlah Pelatihan IKM Wirausaha Baru	1. Tersedianya Pemantauan dan Evaluasi Kawasan Industri IK : Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Kawasan Industri yang terdaftar di SINAS	1. Tersedianya Pemantauan dan Evaluasi Kawasan Industri IK : Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Kawasan Industri yang terdaftar di SINAS		
PROSES		Survey TDG Pendataan TDG Pemberian Rekomendasi Izin	Sosialisasi dengan instansi terkait Memberi pengumuman ke masyarakat Terselenggaranya pasar murah	Laporan Bangunan Pasar Proses Pengadaan Rehab Proses rehab	Laporan Bangunan Pasar Proses Pengadaan Rehab Proses rehab	Seleksi IKM Wirausaha baru Pelaksanaan Kegiatan Laporan Hasil Kegiatan	Pelatihan Operator Pemantauan Kawasan industri melalui SInas Laporan Hasil pemantauan melalui SInas			